

## PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN

**Silvana Aprianti**

*silvanaaprianti4@gmail.com*

**Nur Fadjrih Asyik**

**Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya**

### ABSTRACT

*This research aimed to examine the effect of accountability, transparency and supervision on budget management performance. The population was Mojokerto Local Unit Organization. While the research was casual-comparative with quantitative as its approach. Moreover, the data collection technique used purposive sampling with survey as the instrument. In line with, there were 95 respondents as the sample. Furthermore, the respondents were the head of finance and its staff. Additionally, the data were primary which used questionnaires as its sampling technique. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service Solution) 23. The research result concluded accountability had positive effect on budget management performance of government institution. Likewise, its budget target transparency had positive effect on budget management performance of government institution. Similarly, supervision had positive effect on budget management performance of government institution. In brief, this research result had supported all hypotheses which had been formulated.*

*Keywords: accountability, transparency, supervision, budget management performance*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif (*causal-comparative research*) dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Responden dalam penelitian ini terdiri dari kepala dinas, kepala bagian keuangan, dan staf bagian keuangan. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 95 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistical Product and Services Solutions*) versi 23.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran, transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Hasil penelitian ini telah mendukung semua hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengawasan, kinerja pengelolaan anggaran

### PENDAHULUAN

Masyarakat sering menilai organisasi sektor publik sebagai sarang pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan masyarakat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel. Indikasi kerugian organisasi sektor publik ditemukan dalam pengelolaan anggaran akibat kasus korupsi, nilai indikasi kerugian negara mencapai Rp.144,762 triliun (antikorupsi.org, 2019). Sejalan dengan fakta tersebut, maka organisasi sektor publik harus

memperhatikan *Value for Money* (VFM) dalam menjalankan aktivitasnya guna berkinerja perihal pengelolaan anggaran (Purwiyanti, 2017).

Kinerja pengelolaan anggaran selanjutnya terefleksi sebagai *value for money* sebagai pengukuran kinerja pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Purwiyanti, 2017). Kinerja pengelolaan anggaran adalah hasil dari penggunaan anggaran dari kegiatan/program dan aktivitas yang telah dicapai yang diukur dengan jumlah dan kadar mutu (Pasal 1 Ayat 35 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005). Dalam akuntansi sektor publik terdapat dua jenis anggaran yaitu Anggaran Negara dan Daerah APBN/APBD dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap jenis BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-privat. Anggaran tersebut dikatakan berkinerja secara terukur apabila telah melaporkan keuangan yang harus dilaksanakan dengan pembukuan yang terang, rapi, dan pengurusan keuangan daerah harus dilaksanakan secara sehat termasuk sistem administrasinya (Aprianti dan Riharjo, 2017). Untuk mendapatkan laporan anggaran berkinerja tersebut diperlukan mekanisme *good governance*, yakni memperhatikan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan.

Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) (Faisal, 2009). Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa akuntabilitas dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Terwujudnya akuntabilitas dapat dilihat berdasarkan akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan (Mardiasmo, 2018). Setiap pelaksanaan anggaran tersebut diperlukan pertanggungjawaban dan terbuka untuk diperiksa agar terjamin efisiensi dan efektivitas suatu anggaran, sehingga dapat berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran (Arifani, 2018; Purwiyanti, 2017; Pertiwi, 2015; Damayanti, 2018; Aprianti dan Riharjo, 2017; Nababan *et al.*, 2018).

Selanjutnya, transparansi berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya (Kaihatu, 2006). Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya mewujudkan transparansi publik, dibutuhkan 4 (empat) dimensi terukur, yakni kerangka kerja hukum bagi transparansi, akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, audit yang independen dan efektif, serta keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran (Aprianti dan Riharjo, 2017; Arifani, 2018; Damayanti, 2018). Karena dalam setiap penyelenggaraan pemerintah harus terbuka untuk masyarakat agar pengumuman anggaran bisa didapat setiap waktu dan mudah di akses oleh publik sehingga pencapaian hasil program yang ditetapkan dapat berjalan efektif (Arifani, 2018; Purwiyanti, 2017; Pertiwi, 2015; Damayanti, 2018; Arifani, 2018; Aprianti dan Riharjo, 2017; Nababan *et al.*, 2018).

Pengawasan adalah variabel penentu dari terwujudnya akuntabilitas dan transparansi, yakni kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelajaran pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan (Kaihatu, 2006). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pengawasan adalah penilaian, evaluasi, dan kontrol terhadap keseluruhan proses kegiatan pemeriksaan yang bertujuan agar

perencanaan dan pelaksanaan berjalan maksimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Hakekatnya pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadi penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Sebagai upaya mewujudkan pengawasan sektor publik, dibutuhkan 3 (tiga) dimensi terukur, yakni *input* (masukan) pengawasan, proses pengawasan dan *output* (keluaran) pengawasan (Mardiasmo, 2018). Karena pengawasan dilaksanakan untuk meminimalisir kebocoran anggaran yang dilakukan sesuai dengan undang-undang secara efektif (Arifani, 2018; Purwiyanti, 2017; Pertiwi, 2015; Damayanti, 2018; Aprianti dan Riharjo, 2017; Nababan *et al.*, 2018).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa secara signifikan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran (Arifani, 2018; Purwiyanti, 2017; Pertiwi, 2015; Damayanti, 2018; Aprianti dan Riharjo, 2017; Nababan *et al.*, 2018). Pengaruh signifikan tersebut didasarkan pada tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah untuk lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal bukan hanya akuntabilitas vertikal. Sebab, proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Disamping, Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Terakhir, sebelum ke tahap pelaksanaan, anggota dewan diharapkan telah mengetahui cara untuk mengawasi anggaran agar dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Berpijak atas hasil temuan kajian empiris tersebut, dapat dikemukakan bahwa penelitian tentang akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran memberikan bukti bahwa adanya pengaruh terhadap ranah organisasi sektor publik. Hal demikian juga berlaku pada ranah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto selanjutnya dijadikan sebagai objek kajian tema penelitian. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran?, (2) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran?, (3) Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran?. Sehingga tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan anggaran, (2) Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran, (3) Untuk menganalisis pengaruh pengawasan terhadap kinerja pengelolaan anggaran.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang berkepentingan baik secara praktis, maupun teoritis. Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah: (1) Kontribusi praktis yaitu, hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang usaha atau cara yang ditempuh bila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengkaji ulang hasil kinerja pengelolaan anggaran yang didapatkan, serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam saat mengalami turun atau naiknya pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola anggaran dikarenakan pengaruh dari akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan tersebut, sehingga tidak sampai mengalami kebocoran anggaran, (2) Kontribusi teoritis yaitu, hasil penelitian ini diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan anggaran.

## TINJAUAN TEORITIS

### Konsep *Good Corporate Governance*

Nasarudin (2014) mengungkapkan bahwa *good corporate governance* diterjemahkan dalam pendekatan model komprehensif *principal-agency theory* dimana *good corporate governance* menjelaskan bagaimana pemerintahan yang terlibat dalam berperilaku berdasarkan kepentingan yang berbeda untuk menangani kerawanan ekonomi birokrasi akibat masalah *creative accounting*, kerugian dalam skala besar, penyalahgunaan dana *stakeholder* oleh para pejabat, terbatasnya peran auditor, tidak jelasnya kaitan antara kompetensi eksekutif dengan kinerja pemerintahan, merger dan akuisisi yang merugikan perekonomian secara keseluruhan. Lebih lanjut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2008) menerjemahkan *good corporate governance* sebagai perangsang atau insentif baik bagi *board* dan manajemen secara efektif, dimana *good corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen, *board*, dan pemegang saham, serta pihak lain yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Seperti mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja. Tujuannya adalah memberikan insentif yang baik bagi *board* dan manajemen dalam kepentingan yang sama sehingga perusahaan mampu menghasilkan sumberdaya yang lebih efisien. Secara normatif, penerapan *good corporate governance* di Indonesia dilatarbelakangi oleh Surat Edaran Meneg. PM dan RBUMN Nomor S.106/M.PM RBUMN/2000 yang menyebutkan bahwa *good corporate governance* didefinisikan sebagai 'pentadbiran korporat yang baik'. Maksud pentadbiran disini adalah: (1) Pentadbiran merupakan pelaksanaan tugas rutin harian dan tidak melibatkan perencanaan hal-hal yang strategis dan fundamental, (2) Pentadbiran tidak termasuk dalam hal-hal pengambilan keputusan, (3) Pentadbiran merupakan sistem pelaksanaan dan koordinasi untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan pengurusan merupakan koordinasi sumber daya manusia.

### Akuntabilitas

Akuntabilitas dipahami sebagai sebuah pertanggungjawaban yang menyangkut tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya berkaitan dengan administrasi publik (Faisal, 2009). Dalam konteks ini KNKG (2008) menyebutkan asas akuntabilitas adalah perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.

Akuntabilitas sektor publik dituntut dapat menjadi alat perencanaan dan pengendalian organisasi sektor publik secara efektif dan efisien, serta memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik. Menurut Mardiasmo (2018) terdapat 4 dimensi sebagai alat pengukuran akuntabilitas, yaitu: (1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, kejujuran terkait akuntabilitas dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Pertanggungjawaban harus disampaikan secara

berkala sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) Akuntabilitas proses, akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya, (3) Akuntabilitas program, akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Pertanggungjawaban lembaga negara dan penyelenggara negara diawasi oleh masyarakat dan lembaga yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan, (4) Akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Lembaga negara harus menetapkan rincian fungsi, tugas serta wewenang dan tanggungjawab masing-masing penyelenggara negara yang selaras dengan visi, misi dan tujuan lembaga negara yang bersangkutan. Lembaga negara maupun individu penyelenggara negara harus memiliki ukuran kinerja serta memastikan tercapainya kinerja tersebut.

### **Transparansi**

Terminologi transparansi dapat dipahami tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya (Haris, 2007). Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Menurut KNKG (2008) menyebutkan transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif. Untuk itu, diperlukan penyediaan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang pola perumusan dan isi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya oleh masing-masing lembaga negara. Transparansi juga diperlukan dalam rangka penyusunan dan penggunaan anggaran. Asas transparansi ini tidak mengurangi kewajiban lembaga negara serta penyelenggara negara untuk merahasiakan kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus menolak memberikan informasi yang berkaitan dengan keselamatan negara, hak-hak pribadi dan rahasia jabatan. Transparansi dalam sektor publik adalah menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Mardiasmo, 2018). Sebagai prinsip *Good Corporate Governance*, transparansi menjadi kebijakan terbuka bagi pengawasan, dimana informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik (Franita, 2018).

Menurut Aprianti dan Riharjo (2017); Arifani (2018) dan Damayanti (2018), pengukuran transparansi dapat dilihat berdasar empat dimensi, yakni: (1) Kerangka kerja hukum bagi transparansi, adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi. Kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal, (2) Akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, Adalah adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses penganggaran). Akses ini biasanya dipublikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia [BPK RI]), (3) Audit yang independen dan efektif, dimaksudkan adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran. Sistem peringatan dini dalam pengelolaan keuangan dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dengan arti sistem peringatan dini tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sewaktu-waktu bisa dilakukan, (4) Keterlibatan masyarakat dalam

pembuatan keputusan anggaran, Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran adalah masyarakat ikut berpartisipasi biasanya pada kegiatan musrembang yang diselenggarakan oleh pihak Bappeda. Dalam kegiatan musrembang tersebut masyarakat menyampaikan apa saja yang sedang mereka butuhkan, menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka.

### **Pengawasan**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pengawasan adalah penilaian, evaluasi, dan kontrol terhadap keseluruhan proses kegiatan pemeriksaan yang bertujuan agar perencanaan dan pelaksanaan berjalan maksimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Di lain sisi, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakekatnya pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadi penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi (Kaihatu, 2006). Adapun objek pengawasan sektor publik adalah masalah keuangan, yakni segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran (Mardiasmo, 2018). Dengan pengertian lain, dapat dipahami bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan dan pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2018), pengukuran pengawasan terdiri atas tiga dimensi, yakni *input* (masukan) pengawasan, proses pengawasan dan *output* (keluaran) pengawasan sebagai berikut: (1) *Input* (masukan) pengawasan, yaitu *input* dalam kegiatan pengawasan terkait dengan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana, serta waktu yang dipergunakan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan, (2) Proses pengawasan, yaitu proses pengawasan berkaitan erat dengan tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan, (3) *Output* (keluaran) pengawasan yaitu *output* pengawasan terkait dengan laporan hasil pengawasan dan pengaruhnya terhadap obyek yang diperiksa atau pihak-pihak terkait lainnya.

### **Kinerja Pengelolaan Anggaran**

Kinerja merupakan produk dari kegiatan administrasi, yaitu kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya biasa disebut sebagai manajemen (Mahmudi, 2015). Sedangkan organisasi adalah sekelompok orang yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hartanto, 2009). Sehingga, kinerja adalah hasil kerja yang didapatkan didalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Tujuan kinerja adalah jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan, maka instansi terkait kadang atau sering tidak memperhatikan kinerja instansi atau organisasi kecuali kinerja sudah amat buruk. Untuk itu, diperlukan beberapa informasi tentang kinerja yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini, sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum (Hartanto, 2009). Sebagaimana organisasi sektor publik, bahwa kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan publik dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Tekanan terhadap organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah adalah memperbaiki kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Hal

ini dimaksudkan agar pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien dalam rangka mensejahterakan masyarakat (Mardiasmo, 2018). Hasil dari kinerja organisasi ini dimaksudkan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

Kinerja pengelolaan anggaran dikur berdasarkan konsep *Value For Money* (VFM). Menyadur kajian Purwiyanti (2017), bahwa *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input*, *output* dan *outcome* secara bersama-sama. *Value for Money* dijadikan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas sebagai berikut: (1) Ekonomis, yaitu biaya organisasi yang sesungguhnya terjadi lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan, biaya organisasi yang sesungguhnya terjadi lebih besar dibandingkan biaya organisasi lain yang sejenis, dan penggunaan sumber daya finansial secara optimal, (2) Efisien, yaitu diukur dengan rasio antara output dengan input. Apabila semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi, (3) Efektivitas, yaitu hanya melihat suatu program atau kegiatan telah atau belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi telah berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran**

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pincipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:20). Hal ini dapat dilihat dari definisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program. Hal ini sejalan dengan pendapat Arifani (2018) yang menyatakan bahwa dengan meningkatkan akuntabilitas juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini di dukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sengaji dan Asyik (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran.

#### **Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran**

Keterbukaan dan kebebasan dalam memperoleh informasi merupakan aspek dasar dari transparansi. Artinya, secara langsung masyarakat dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik (Aprianti dan Riharjo, 2017; Purwiyanti, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Arifani (2018), Purwiyanti (2017), Pertiwi (2015), Damayanti (2018) menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran berbasis *value for money* pada pengelolaan keuangan daerah dan didukung oleh penelitian Nababan *et al.*, (2018) yang menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif pada kinerja anggaran berbasis *value for money*. Sejalan dengan hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan Asyik (2019) menunjukkan hasil bahwa dengan adanya transparansi akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sehingga menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran juga semakin baik. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: H<sub>2</sub>: Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran.

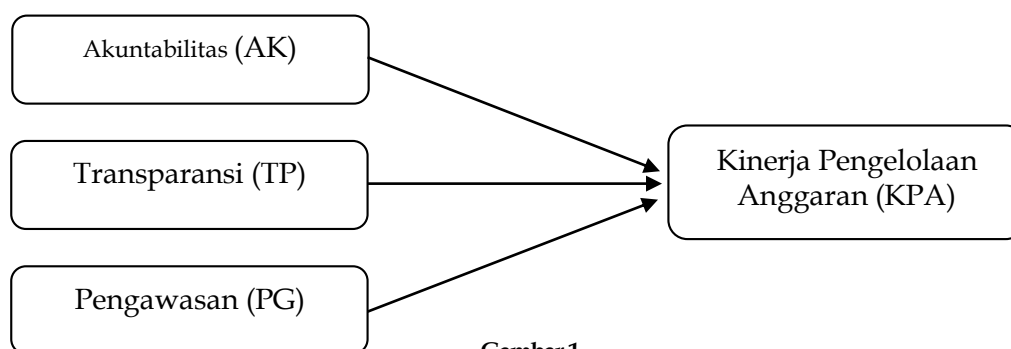
### Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran

Pengawasan perlu dilakukan karena dalam hal untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Arifani, 2018). Pengawasan juga merupakan bentuk antisipasi pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan sehingga kegiatan atau aktivitas pemerintah dapat berjalan dengan baik dan maksimal (Aprianti dan Riharjo, 2017). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa pengawasan memiliki pengaruh terhadap pengelolaan anggaran menggunakan pendekatan *value for money* karena pengawasan dilaksanakan untuk meminimalisir kebocoran anggaran yang dilakukan sesuai dengan undang-undang secara efektif (Arifani, 2018; Purwiyanti, 2017; Pertiwi, 2015; Damayanti, 2018). Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran.

### Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1  
Model Penelitian

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian survei, yaitu suatu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data (Morrison, 2017:166). Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yakni penelitian yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah berdasar metode statistika (Siregar, 2014:2), dengan tujuan menguji hubungan antar dua variabel, tidak saja dalam bentuk sebab akibat melainkan juga timbal balik antara dua variabel dengan mengembangkan pemahaman atau mendiskripsikan banyak hal (Sugiyono, 2014:12). Adapun survei yang dilakukan adalah menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Penelitian ini menggunakan populasi untuk menjelaskan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan memiliki kesempatan yang sama (Priyono, 2008:104). Populasi dalam penelitian ini dibatasi dengan menganalisis data primer dengan pengambilan populasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto

### Teknik Pengambilan Sampel

Sampel penelitian didasarkan pada teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling* yang dipergunakan untuk mengambil sampel secara representatif dengan kriteria pemilihan sampel (Sugiyono, 2014:49). Tujuan penggunaan metode ini adalah kriteria sampel



yang diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, maka kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Memiliki jabatan sebagai Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan, dan Staf Bagian Keuangan, (2) Memiliki masa kerja selama 1 tahun lebih pada Dinas dan Badan di OPD Kota Mojokerto. Kriteria yang diambil dengan pertimbangan tertentu ini telah dianggap sebagai orang yang paling mengerti dan menguasai tentang yang menjadi tinjauan atau objek dalam penelitian ini. Berdasarkan kriteria di atas, sampel dalam penelitian ini terdiri dari 16 Dinas dan 3 Badan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mojokerto. Peneliti hanya menggunakan Dinas dan Badan karena Dinas dan Badan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Kepala Bagian Keuangan, dan 3 Staf Bagian Keuangan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan (Morrisan, 2017:294). Data primer dalam penelitian ini bersumber dari metode survei dalam bentuk kuesioner yang didapat dari responden untuk dianalisis berdasarkan daftar pernyataan kuesioner. Kuesioner disebarikan kepada seluruh Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan, dan Staf Bagian Keuangan di OPD Kota Mojokerto yang telah dipilih sebagai sampel penelitian. Tipe pernyataan dalam kuesioner bersifat tertutup, yakni pernyataan yang mengharapkan jawaban singkat atau responden diminta memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pernyataan yang diajukan. Berdasarkan pengukuran konstruk sikap, metode yang digunakan dalam pemberian skor atau nilai adalah skala likert. Skala likert adalah metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini terdapat variabel independen (bebas) dan juga variabel dependen (terikat). Variabel independen atau bebas dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Sedangkan variabel dependen atau terikat dalam penelitian ini adalah kinerja pengelolaan anggaran.

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban pengelolaan anggaran serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk memberikan informasi dan penyingkapan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Indikator akuntabilitas terdiri atas empat dimensi, yakni akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan (Mardiasmo, 2018). Instrumen ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert diperoleh dari hasil kuesioner. Indikator untuk mengukur variabel ini adalah kemudahan dan manfaat dengan jumlah 4 item yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2018) sebagai berikut: (1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, (2) Akuntabilitas proses, (3) Akuntabilitas program, (4) Akuntabilitas kebijakan.

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Indikator transparansi terdiri atas empat dimensi, yakni kerangka kerja hukum bagi transparansi, akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, audit yang independen dan efektif, serta keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. Instrumen ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert diperoleh dari hasil kuesioner. Adapun indikator untuk mengukur variabel ini adalah kemudahan dan manfaat dengan jumlah pernyataan 4 item yang dikembangkan oleh Aprianti dan Riharjo (2017), Arifani (2018) dan Damayanti (2018) sebagai berikut: (1) Kerangka kerja hukum bagi

transparansi, (2) Akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, (3) Audit yang independen dan efektif, (4) Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

Pengawasan merupakan kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelajaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator pengawasan terdiri atas tiga dimensi, yakni *input* (masukan) pengawasan, proses pengawasan dan *output* (keluaran) pengawasan. Instrumen ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert diperoleh dari hasil kuesioner. Adapun indikator untuk mengukur variabel ini adalah kemudahan dan manfaat dengan jumlah pernyataan 3 item yang dikembangkan oleh Mardiasmo (2018) sebagai berikut: (1) *Input* (masukan) pengawasan, (2) Proses pengawasan, (3) *Output* (keluaran) pengawasan.

Kinerja pengelolaan anggaran adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Indikator kinerja pengelolaan anggaran didasarkan atas *value for money* terdiri atas tiga dimensi, yakni ekonomis, efisien dan efektivitas. Instrumen ini menggunakan skala pengukuran interval dengan skala Likert. Adapun indikator untuk mengukur variabel ini adalah: (1) Alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi), (2) Kualitas pelayanan (efektivitas).

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis yang dimana perhitungannya menggunakan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) yang bertujuan untuk menentukan pengaruh kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

### **Uji Kualitas Data**

#### **Uji Validitas**

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner yang diukur menggunakan *coefficient correlation pearson* yaitu dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Ghozali (2016) mengatakan bahwa suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dasar analisis yang digunakan untuk pengujian validitas menurut Ghozali (2016:53) adalah: (1) Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka pernyataan tersebut dinyatakan valid, (2) Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

#### **Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya, untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya berupa skala bertingkat (*rating scale*). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Menurut Ghozali (2016:42) menyatakan bahwa jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa konstruk atau variabel penelitian tersebut dapat dikatakan handal dan reliabel.

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen. Tes statistik regresi berganda dengan menggunakan model sebagai berikut:

$$KPA = \alpha + \beta_1 AK + \beta_2 TP + \beta_3 PG + e$$

Keterangan:

KPA	: Kinerja Pengelolaan Anggaran
$\alpha$	: Konstanta
AK	: Akuntabilitas
TP	: Transparansi
PG	: Pengawasan
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	: Koefisien regresi
e	: Error

### Uji Asumsi Klasik

Pertama, uji normalitas yaitu digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat. Untuk menguji apakah distribusi normal atau tidak dapat dilihat melalui normal *probability plot* dengan membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Data normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2016:110).

Kedua, uji multikolinearitas yaitu digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinietitas adalah dengan melihat *tolerance value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Model regresi yang bebas multikolinieritas mempunyai nilai *tolerance* di atas 0,1 atau nilai VIF di bawah 10. Multikolinieritas juga dapat dideteksi dengan menganalisis matriks korelasi variabel independen. Apabila antar variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,09), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas (Ghozali, 2016).

Ketiga, uji heteroskedastisitas yaitu digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap homoskedastisitas (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah yang berjenis homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas menurut Ghozali (2016:105) yaitu jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengukur hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan sebagai berikut: Pertama, uji statistik F (*Goodness Of Fit*) digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) (Ghozali, 2016). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut : (a) Jika nilai signifikansi  $F > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, (b) Jika nilai signifikansi  $F \leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

Kedua, uji Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mencari seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap naik turunnya variasi nilai variabel dependen. Nilai koefisien determinasi  $R^2$  menunjukkan besarnya variabel-variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependent. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 dan 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ).

Ketiga, uji Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan uji t adalah dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha=5\%$ ) (Ghozali, 2016). Ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (a) Jika nilai signifikansi  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, (b) Jika nilai signifikansi  $t \leq 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dengan bantuan perangkat lunak SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar daripada angka kritik ( $r$  hitung  $> r$  tabel) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Pengujian kualitas data dilakukan dengan sampel uji coba sebanyak 95 orang. Angka kritik pada penelitian ini adalah  $N-2 = 95-2 = 93$  dengan taraf signifikan  $\alpha = 5\%$ , maka  $r$  tabel untuk angka kritik dalam penelitian ini adalah 0.2017.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item Pernyataan	r hitung	r tabel ( $\alpha=5\%$ )	Keterangan
Kinerja Pengelola Anggaran	KPA1	0,455	0,2017	Valid
	KPA2	0,379	0,2017	Valid
	KPA3	0,307	0,2017	Valid
	KPA4	0,467	0,2017	Valid
	KPA5	0,358	0,2017	Valid
	KPA6	0,490	0,2017	Valid
	KPA7	0,589	0,2017	Valid
	KPA8	0,547	0,2017	Valid
	KPA9	0,492	0,2017	Valid
	KPA10	0,486	0,2017	Valid
	KPA11	0,518	0,2017	Valid
Akuntabilitas	AK1	0,286	0,2017	Valid
	AK2	0,571	0,2017	Valid
	AK3	0,572	0,2017	Valid
	AK4	0,714	0,2017	Valid
	AK5	0,619	0,2017	Valid
	AK6	0,615	0,2017	Valid
	AK7	0,442	0,2017	Valid
	AK8	0,545	0,2017	Valid
	AK9	0,295	0,2017	Valid
Transparansi	TP1	0,422	0,2017	Valid
	TP2	0,743	0,2017	Valid
	TP3	0,690	0,2017	Valid
	TP4	0,763	0,2017	Valid
	TP5	0,607	0,2017	Valid
	TP6	0,663	0,2017	Valid
	TP7	0,386	0,2017	Valid
	TP8	0,346	0,2017	Valid
	TP9	0,306	0,2017	Valid
Pengawasan	PG1	0,440	0,2017	Valid
	PG2	0,368	0,2017	Valid
	PG3	0,294	0,2017	Valid
	PG4	0,277	0,2017	Valid
	PG5	0,472	0,2017	Valid
	PG6	0,676	0,2017	Valid
	PG7	0,628	0,2017	Valid
	PG8	0,658	0,2017	Valid
	PG9	0,547	0,2017	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Hasil pengujian validitas disajikan dalam Tabel 1 dan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan item pernyataan dari masing-masing variabel dapat dikatakan valid, karena mempunyai nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  ( $r_{hitung} > 0,2017$ ).

### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana jawaban dari kuesioner tersebut memiliki kesamaan atau konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Pengukuran reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's alpha*. Menurut Ghozali (2016:42) menyatakan bahwa jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa konstruk atau variabel penelitian tersebut dapat dikatakan handal dan reliabel. Berdasarkan hasil uji reliabilitas nilai *cronbach's alpha* dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i> (a)	Koefisien <i>alpha</i>	Keterangan
Kinerja Pengelola Anggaran	0,632	0,60	Reliabel
Akuntabilitas	0,659	0,60	Reliabel
Transparansi	0,704	0,60	Reliabel
Pengawasan	0,679	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *cronbach's alpha* yang terdapat pada tabel diatas yaitu kinerja pengelola keuangan sebesar 0,632, sedangkan akuntabilitas sebesar 0,659, transparansi sebesar 0,704, dan pengawasan sebesar 0,679. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa pengukuran data sudah dapat dipercaya (*reliable*).

### Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu mengenai akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan anggaran pemerintah kota Mojokerto. Data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden, diolah dengan menggunakan SPSS versi 23.0. Hasil perhitungan tersaji pada Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	<i>Unstandardized coefficients</i>	
	B	
1 (Constant)		14.554
AK		.238
TP		.342
PG		.241

a. *Dependent Variable: KPA*

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3, maka penjelasan kepatuhan wajib pajak dapat dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut:

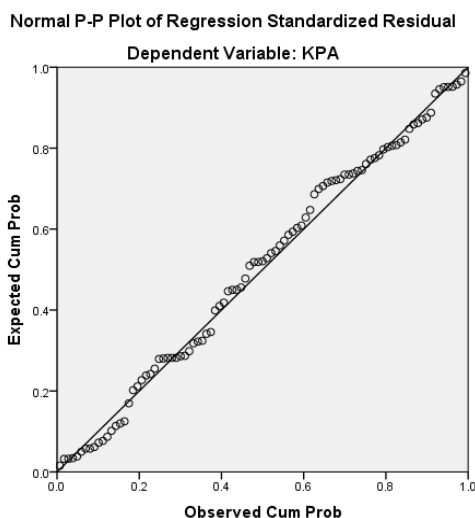
$$KPA = 14,554 + 0,238AK + 0,342TP + 0,241PG + e$$

Penjelasan untuk persamaan diatas adalah: (1) Apabila akuntabilitas suatu pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah semakin baik maka akan meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dan begitu pula sebaliknya jika akuntabilitas suatu pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah semakin buruk maka akan menurunkan kinerja pengelolaan anggaran,

(2) Apabila transparansi semakin baik dan jelas maka akan meningkatkan kinerja pengelola anggaran dan begitu pula sebaliknya jika transparansi semakin buruk dan ditutup-tutupi yang menyebabkan keraguan di masyarakat maka akan menurunkan kinerja pengelolaan anggaran, (3) Apabila pengawasan semakin baik maka akan meningkatkan kinerja pengelola anggaran dan begitu pula sebaliknya jika pengawasan semakin buruk dan menyebabkan bocornya anggaran, maka akan menurunkan kinerja pengelolaan anggaran.

### Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variabel *dependen* (terikat) dan variabel *independen* (bebas) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Data dalam keadaan normal apabila distribusi data menyebar disekitar garis diagonal. Uji normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data yang mengikuti garis diagonal seperti pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2  
Uji Normalitas

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan pada Gambar 2 *Normal P- P Plot Regression Standardized* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain itu untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4  
Hasil Uji Normalitas Sesudah *Outlier*  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.27514389
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.047
	Negative	-.071
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar  $0,200 > 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi normal serta memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untuk digunakan dalam penelitian.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2016:105). Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila dari hasil pengujian diperoleh nilai TOL lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF menunjukkan kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas (Ghozali, 2016:106). Hasil pengujian multikolinieritas dapat di lihat pada Tabel 5 berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

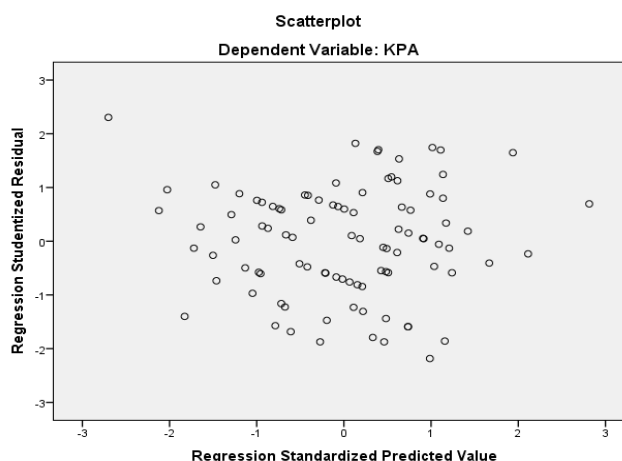
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
AK	.999	1.001
TP	.990	1.010
PG	.989	1.012

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui nilai *tolerance* (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai TOL  $> 0,10$  dan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF  $< 10$ . Maka dapat disimpulkan bahwa model dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinieritas antar variabel.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi perbedaan varian residual dari suatu periode pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual dari suatu periode pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, dan jika varian berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat gambar hasil SPSS berikut ini :



**Gambar 3**

**Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas dengan uji glejser pada Tabel 6 hasil SPSS berikut ini:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Glejser**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients			t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.516	.082		6.287	.000
AK	-.091	.087		-1.045	.301
TP	.352	.197		-1.781	.081
PG	-2.874	.000		-.327	.745

a. Dependent Variable: RES1

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa nilai Sig dari seluruh variabel menunjukkan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji F (*goodness of fit*)

Uji F digunakan untuk menguji kelayakan model penelitian yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai F yang terlihat pada ANOVA tersaji pada Tabel 7 sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji F (*goodness of fit*)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	175.261	3	58.420	10.926	.000 <sup>b</sup>
Residual	486.570	91	5.347		
Total	661.832	94			

a. Dependent Variable: KPA

b. Predictors: (Constant), PG, AK, TP

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan pada Tabel 7 maka dapat disimpulkan bahwa nilai F hitung sebesar 10,926 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ( $\alpha=5\%$ ), maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa model penelitian layak digunakan untuk menguji pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dihasilkan baik dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi menunjukkan proporsi dari varian yang diterangkan oleh persamaan regresi terhadap varian total. Dari uji determinasi dihasilkan nilai  $R^2$  sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 8 sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.515 <sup>a</sup>	.265	.241	2.312

a. Predictors: (Constant), PG, AK, TP

b. Dependent Variable: KPA

Sumber: Data primer diolah, 2020



Berdasarkan pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai *R Square* pada penelitian ini sebesar 0,392 atau 39,20%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi *E-Registration*, *E-Billing* dan *E-Filing* menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 39,20% sedangkan sisanya 60,80% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di ikut sertakan dalam model.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara parsial atau individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016). Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan SPSS 23 didapat hasil uji t seperti yang tersaji pada Tabel 9 sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	14.554	5.102	2.853	.005
AK	.238	.092	2.586	.011
TP	.342	.084	4.055	.000
PG	.241	.086	2.795	.006

a. Dependent Variable: KAP

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan pada Tabel 9 hasil uji t di atas, menunjukkan hasil pengujian sebagai berikut: (1) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar  $0,011 < 0,05$  dan hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima, (2) Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran, hal ini dibuktikan dengan signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dan hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima, (3) Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar  $0,006 < 0,05$  dan hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima.

### Pembahasan

#### Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*pincipal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:20). Seseorang yang memiliki Akuntabilitas yang tinggi pada organisasi akan menimbulkan kinerja organisasi yang tinggi dan meningkatnya loyalitas karyawan pada organisasi. Secara umum, dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Pada pengelolaan anggaran perlu adanya akuntabilitas, dimana semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik di pusat maupun di daerah. Selain itu dengan adanya Akuntabilitas yang kuat, mereka juga akan bekerja dengan keras dan ikhlas dalam melaksanakan pekerjaannya yang nantinya akan berujung pada meningkatnya kinerja dan tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Hal ini di tunjukan dari nilai koefisien regresi sebesar 0,238 dan nilai signifikansi sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis pertama ( $H_1$ ) pada penelitian ini diterima. Hasil positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi akuntabilitas di suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga akan meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi anggaran daerah. Hal ini juga ditunjukkan dari hasil jawaban responden atas seluruh pernyataan akuntabilitas dengan nilai rata-rata sebesar 3,71 pada kelas interval termasuk dalam kategori 3,40 - 4,19 yang menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mojokerto sebagian

besar setuju dan telah mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan sehingga kinerja pengelolaan anggaran telah berjalan dengan baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifani (2018), Purwiyanti (2017), Pertiwi (2015) dan Damayanti (2018) yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Jadi dengan adanya pertanggungjawaban yang baik terhadap anggaran dan semua kegiatan maka akan meningkatkan kinerja pengelola anggaran. Karena semakin baik akuntabilitas tentu akan membuat pandangan baik bagi pihak internal, maupun pihak eksternal dimana pandangan tersebut mampu memotivasi kinerja pengelola anggaran untuk bekerja dengan baik sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.

### **Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran**

Transparansi dalam sektor publik merupakan menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Mardiasmo, 2018). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi dalam anggaran dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah korupsi, sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Adanya transparansi mengakibatkan masyarakat menjadi semakin kritis dalam menanggapi setiap kejadian-kejadian yang ada, sehingga bisa digunakan sebagai alat pengendalian terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Hal ini di tunjukan dari nilai koefisien regresi sebesar 0,342 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis kedua ( $H_2$ ) pada penelitian ini diterima. Hasil positif ini menunjukkan bahwa semakin mudah masyarakat mendapat akses informasi tentang penyelenggaraan pemerintah maka semakin tinggi pula kinerja pengelolaan anggaran suatu organisasi. Hal ini juga ditunjukkan dari hasil jawaban responden atas seluruh pernyataan transparansi dengan nilai rata-rata sebesar 3,77 pada kelas interval termasuk dalam kategori 3,40 - 4,19 yang menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mojokerto sebagian besar setuju dan telah memberikan keterbukaan serta kemudahan akses dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifani (2018), Purwiyanti (2017), Pertiwi (2015), Damayanti (2018) serta Nababan *et al.*, (2018) yang menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran, Jadi secara keseluruhan, dengan adanya transparansi sebagai amanat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pemerintahan telah memberikan tekanan kepada aparatur pengelola pemerintahan untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Alasan ini akan menjadikan aparatur pemerintah akan menampilkan kinerja terbaiknya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga dia akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya kinerja pemerintah daerah juga akan baik.

## **Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran**

Pengawasan merupakan mencegah sedini mungkin terjadi penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi (Kaihatu, 2006). Adapun objek pengawasan sektor publik adalah masalah keuangan, yakni segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan penerimaan-penerimaan negara, penyaluran pengeluaran-pengeluaran negara tidak menyimpang dari rencana yang telah digariskan di dalam anggaran (Mardiasmo, 2018). Pengawasan memberikan keyakinan yang memandai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan pengukuran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan adanya pengawasan terhadap pemerintah yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga menunjukkan jika kinerja pengelolaan anggaran yang berjalan dengan baik. Dengan demikian semakin tinggi tingkat pengawasan maka semakin tinggi pula kinerja pengelolaan anggaran karena pengawasan yang efektif dapat membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan hasil bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Hal ini di tunjukan dari nilai koefisien regresi sebesar 0,241 dan nilai signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis ketiga ( $H_3$ ) pada penelitian ini diterima. Hasil positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengawasan yang dilakukan terhadap perangkat daerah maka semakin tinggi pula kinerja pengelolaan anggaran suatu organisasi. Hal ini juga ditunjukkan dari hasil jawaban responden atas seluruh pernyataan pengawasan dengan nilai rata-rata sebesar 3,94 pada kelas interval termasuk dalam kategori 3,40 - 4,19 yang menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mojokerto sebagian besar setuju dan telah menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelajaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga kinerja pengelolaan anggaran daerah telah berjalan dengan baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifani (2018), Purwiyanti (2017), Pertiwi (2015) dan Damayanti (2018) yang menunjukkan hasil bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan anggaran. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sesungguhnya terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Sehingga, bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat segera diambil tindakan koreksi. Ini berarti bahwa semakin meningkatnya pengawasan yang dilakukan di dalam suatu organisasi, maka setiap pelaksanaan kegiatan dapat dicegah atau diperbaiki penyimpangannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggarannya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja pengelola anggaran pemerintah kota Mojokerto . Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan melalui beberapa uji yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Pengujian pengaruh akuntabilitas pada kinerja pengelolaan anggaran menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,011, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pengelola anggaran, (2) Pengujian pengaruh transparansi terhadap kinerja pengelola anggaran menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pengelola anggaran, (3) Pengujian pengawasan terhadap kinerja pengelola anggaran menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,006, nilai tersebut lebih

besar dari 0,05, hal ini berarti pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja pengelola anggaran.

### **Keterbatasan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa keterbatasan yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Waktu yang terbatas untuk responden mengisi kuesioner. Semakin lama waktu yang diberikan maka hasil yang didapat lebih valid, (2) Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, sehingga sangat mungkin datanya bersifat subyektif, akan lebih baik bila ditambahkan metode wawancara sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih lengkap. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Mojokerto.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang bisa disampaikan peneliti antara lain: (1) Untuk penelitian selanjutnya mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian yang lebih luas dengan ruang lingkup provinsi, (2) Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang masih mempengaruhi kinerja pengelolaan anggaran misalnya komitmen organisasi dan motivasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antikorupsi.org. 2019. *Pengelolaan Buruk, Negara Berpotensi Merugi*. Jakarta. <https://antikorupsi.org/id/siaran-pers/pengelolaan-buruk-negara-berpotensi-merugi>.
- Aprianti, E. R. dan I. B. Riharjo. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(12): 1-17.
- Arifani, C. 2018. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berbasis Value For Money Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Jayapura. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* 13(1): 68-82.
- Damayanti, E. 2018. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 7(3): 1-21.
- Faisal, A. 2009. *Jalan Terjal Good Governance: Prinsip, Konsep dan Tantangan Dalam Negara Hukum*. PUKAP. Makassar.
- Franita, R. 2018. *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi untuk Perusahaan Telekomunikasi*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI. Medan.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Haris, S. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*. LIPI Press. Jakarta.
- Hartanto, F. M. 2009. *Paradigma Baru Manajemen Indonesia: Menciptakan Nilai Dengan Bertumpu Pada Kebijakan dan Potensi Indonesia*. Mizan. Jakarta.
- Kaihatu, T. S. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 8(1): 1-9.
- Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001. Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2008. *Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance. Jakarta.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. STIM YKPN. Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.

- Morrison. 2017. *Metode Penelitian Survei*. Prenada Kencana. Jakarta.
- Nababan, R. A., M. Sihombing., dan H. Thamrin. 2018. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value for Money pada Pemerintah di Kabupaten Dairi. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* 4(1): 108-120.
- Nasarudin, M. I. 2014. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Novitasari., dan N. F. Asyik. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(9): 1-16
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.
- Pertiwi, D. P. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Studi Empiris Skpd Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi* 2(2): 1-15.
- Priyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Zifatama Publishing. Sidoarjo.
- Purwiyanti, D. 2017. Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu. *E-Jurnal Katalogis* 5(3): 190-200.
- Sengaji, I., dan N. F. Asyik. 2018. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dada Desa (ADD) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 7(3): 1-18.
- Siregar, S. 2014. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabetha. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 25 Tahun 1999. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.